

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

Oleh
Kenty Ratnasari

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya
Email : Kentyratna24@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. (2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. (3) Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. (2) Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tahun 2019

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) Effect of General Allocation Funds on Capital Expenditures in Regencies / Cities in East Java Province in 2019. (2) Effect of Regional Original Revenues on Capital Expenditures in Regencies / Cities in East Java Province in 2019. (3) The effect of simultaneous General Allocation Funds and Regional Original Revenues on Capital Expenditures in Regencies and Cities in East Java

Province in 2019. This research is a sampling technique.. The population in this study are all regencies / cities in East Java Province, amounting to 38 .. The results showed that: (1) General Allocation Funds (DAU) did not significantly influence capital expenditure in districts / cities in East Java Province in 2019. (2) Regional original income significantly influences capital expenditure in regencies and cities in East Java Province in 2019. (3) Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) have a significant simultaneous effect on Capital Expenditures in Regencies and Cities in the province of Java in 2019.

Keywords : General Allocation Funds, Regional Revenue, CapitalExpenditure

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah yang berada di wilayah negara Indonesia tidak akan terlepas dari adanya peran pemerintah pusat dan peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di setiap daerah. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berlaku di setiap wilayah Republik Indonesia yang menjadikan pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dengan cakupan luas salah satunya meliputi mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service*.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana berbentuk anggaran belanja modal didalam susunan APBD yang bertujuan untuk menambah asset tetap dan asset lainnya. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah untuk sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas maupun untuk pelaksanaan *public service*. Oleh karena itu, dalam peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Menurut Juli Panglima Sarangih menyatakan bahwa pemanfaatan belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Dalam penerapan desentralisasi fiksial di Indonesia secara formal dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan perimbangan

finansial mengatur pendanaan dari pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merupakan cara peningkatan kinerja ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Sukarna:2013;34). Karena masing masing daerah memiliki kesanggupan keuangan yang berbeda dalam menandai aktivitas-aktivitas pemerintahannya, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan kemampuan keuangan disetiap daerah dapat menyebabkan ketimpangan keuangan antar daerah satu dan daerah yang lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan hasil PAD yang sah lainnya. Menurut Mahmudi (2010:18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan.

Alokasi finansial dari pusat ke pemerintahan daerah diantaranya Dana Alokasi Umum, yang diberikan untuk memberikan manfaat finansial yang merata dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Menurut Sukarna (2013:42) Dana Alokasi Umum (DAU) daerah pemberiannya dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih kebutuhan daerah dengan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Pemberian Dana Alokasi Umum untuk daerah yang memiliki keuangan yang mencukupi namun keperluan keuangan kecil maka mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum yang kecil, begitu juga sebaliknya. Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan pada APBD. DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari DAU.

Dilihat dari rasio pertumbuhan di Provinsi Jawa timur pada tahun 2013-2016 yaitu belanja rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pergerakan positif dengan rata-rata sebesar 27,97% karena pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2016 belanja modal sebesar 8,34%, sedangkan rasio pertumbuhan PAD tahun 2016 sebesar 2,7%. PAD juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang melebihi 100% tiap tahunnya. 2017 APBD Jawa

Timur telah tercatat ada kenaikan anggaran sebesar 2,1 triliun dalam APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jawa Timur sebesar 17,32 triliun yaitu 9,54% tetapi Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan, serta aktivitas pada belanja operasi sebesar 24,42% dan belanja modal sebesar 43,86%. Secara agresif untuk pemerintahan kab/kota tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, dimana anggaran pendapatan meningkat 4,3% dan anggaran belanja meningkat 4,5%. DAU meningkat sebesar 0.77 triliun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang diatas, saya melakukan penelitian dengan judul ” **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019**”.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja modal pemerintahan yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran yang akan menambah kekayaan atau aset daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintahan daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Menurut Halim (2014:229) belanja modal merupakan salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam penelitian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya

guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2010 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Awaniz (2011;19) dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

Menurut Halim (2016;127) menyatakan dana alokasi umum merupakan transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintahan daerah mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan Dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

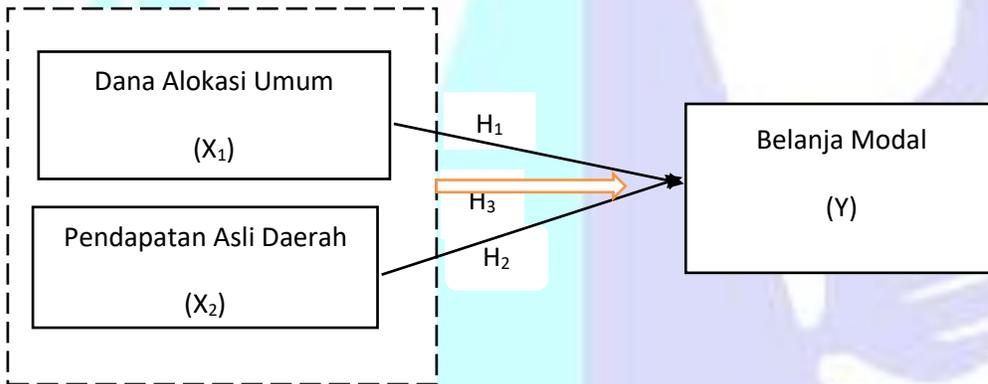
Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang berupa dana yang cara memperolehnya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peratur perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 kerangka konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:8) Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian berupa penelitian deskriptif (*descriptive study*) yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. yang terdiri dari Kabupaten dan Kota. Jumlah Kabupaten ada 29, yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pamengkasan, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo, Kab. Sumenep, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban dan Kab. Tulungagung. Sedangkan jumlah kota ada 9, yaitu Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Batu.

METODE ANALISIS DATA

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Menurut Sunyoto (2016:92) menjelaskan bahwa uji normalitas, dimana akan menguji data variabel x dan variabel y pada persamaan regresi yang dihasilkan. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal. Asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang dalam berdistribusi normal. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal. Dan sebaliknya apabila probabilitas lebih dari 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sunyoto (2016:90) menjelaskan uji heteroskedastisitas sebagai berikut : "Dalam persamaan regresi beranda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Menurut Sunyoto (2016:87) menjelaskan bahwa multikolinieritas adalah uji asumsi klasik yang diterapkan untuk menganalisis regresi linier berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas dimana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r).

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2014:271) Regresi linier berganda adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keseluruhan variable x terhadap variabel y. Persamaan umum regresi linier berganda adalah

$$Y = \alpha + b_1DAU + b_2PAD$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = konstanta

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka kenaikan dan sebaliknya bila b (-) maka terjadi penurunan.

DAU = dana alokasi umum

PAD = pendapatan asli daerah

Uji Parsial (t test)

Sugiyono (2017:231) Uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Maka dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai uji t

n = jumlah sampel

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

r² = Koefisien Determinasi

Uji Simultan (F test)

Sugiyono (2017:235) Uji pengaruh simultan (F test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Nilai koefisien ganda

N = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016:95) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien Determinasi (Kd) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

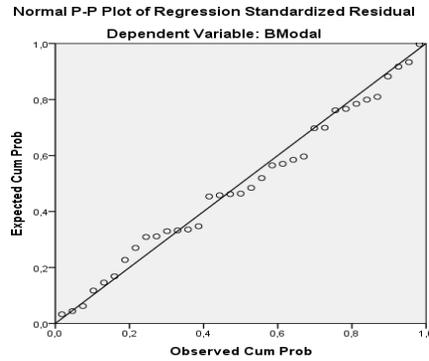
Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien kuadrat korelasi ganda

HASIL ANALISIS PENELITIAN

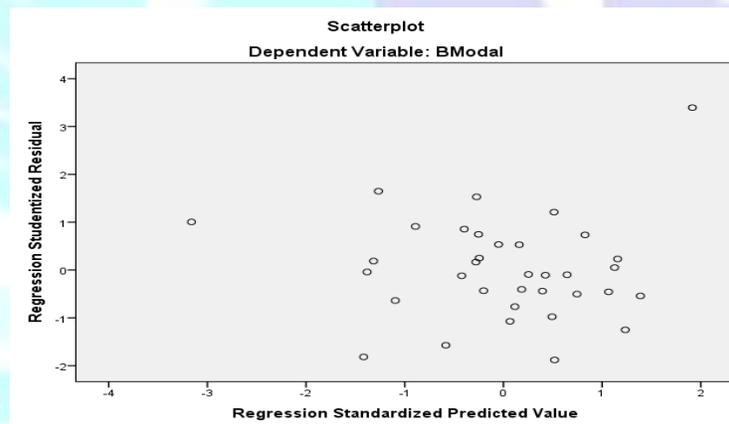
Uji Normalitas



Gambar 4.2 Diagram Normalitas

Dari grafik *Normal Probability Plot* dapat diketahui bahwa pada grafik tersebut terdapat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya terlihat mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian model regresi yang di gunakan oleh peneliti layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.3 heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Output SPSS 20

Persamaan regresi pada uji heteroskedastisitas diatas tidak terjadi pola yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	200934,336684,180	120642,106472,296		1,666	,105		
PAD	,254	,066	,574	3,884	,000	,915	1,093
DAU	-,154	,149	-,152	1,028	,311	,915	1,093

a. Dependent Variable: Bmodal

Sumber : Hasil Output SPSS 20

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai toleransi yang diperoleh kurang dari 1, dan VIF yang diperoleh untuk masing-masing variabel bebas antara 1 sampai dengan 10 sehingga menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

UJI HOPPOTESIS

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			

1	(Constan t)	200934336684, 180	120642106 472,296		1,666	,105
	PAD	,254	,066	,574	3,884	,000
	DAU	-,154	,149	-,152	-1,028	,311

a. Dependent Variable: Bmodal

Sumber : Hasil Output SPSS 20

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel di atas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 200.934.336.684,18 + 0,254X1 + (-0,154)X2$$

Nilai konstanta sebesar 200.934.336.684,18 hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 200.934.336.684,18 jika Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan nol. . Koefisien regresi X1 sebesar – 0,154 menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan menurun sebesar 0,154 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Koefisien regresi X2 sebesar 0,254 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,254 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Uji t (Uji Parsial)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal memiliki t_{hitung} sebesar 3,884 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel dana alokasi umum terhadap belanja modal memiliki t_{hitung} sebesar -1,028 dan nilai signifikan sebesar 0,311. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2	841700000000,000	7,550	,002 ^b
	Residual	35	34865000000,000		
	Total	37			

a. Dependent Variable: Bmodal

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,002 yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.artinya Variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y



Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,301	,261	258181242743,22 266

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa nilai *R square* sebesar 0,301 ini menandakan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 memiliki kontribusi sebesar 30,1%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan diatas, hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Terbukti dari dana alokasi umum dari hasil analisis regresi berganda diperoleh angka Koefisien regresi sebesar $-0,154$ menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan menurun sebesar 0,154 persen Dan diketahui bahwa variabel dana alokasi umum terhadap belanja modal memiliki t_{hitung} sebesar $-1,028$ dan nilai signifikan sebesar 0,311. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa timur tahun 2019

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan diatas Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa, hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,254 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,254 persen dengan asumsi variabel bebas yang dipengaruhi oleh konstan lain dan

diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal memiliki t_{hitung} sebesar 3,884 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Simultan Terhadap Belanja Modal

pada uji-F simultan menyatakan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,002 yang artinya lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Variabel X_1 Dana Alokasi Umum (DAU) dan X_2 pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Dilihat dari nilai *R square* sebesar 0,301 menandakan bahwa secara simultan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai kontribusi sebesar 30,1%. Jadi hipotesis H_3 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tahun 2019 diterima.

KESIMPULAN

1. Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tahun 2019.

SARAN

1. Bagi pelayanan publik pemerintahan untuk meningkatkan pendanaan pelayanan publik yang berguna untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik, pemerintah harus terus menggali potensi-potensi yang ada pada setiap daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk pemerintah daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan dana alokasi umum yang telah diberikan lebih baik lagi, supaya pelayanan publik lebih mendapatkan kualitas yang lebih baik dan pemerintah diharapkan lebih mampu

memanfaatkan dana yang masuk ke dalam belanja modal yang lebih berguna untuk meningkatkan sarana dan prasana baik dalam insfrastruktur untuk menunjang kenyamanan masyarakat dan layanan publik.

3. Untuk Dana Alokasi Umum yang sudah di transfer ke setiap daerah-daerah perlu dipisahkan secara tegas antara DAU yang digunakan untuk pos belanja pegawai, belanja barang serta jasa dan pos untuk pembangunan infrastruktur. Pemisahan ini harus dilakukan secara tegas sesuai tujuan utama DAU yang digunakan untuk pemerataan daerah untuk mengurangi kesenjangan terutama pada kesenjangan insfrastruktur pada setiap daerah. Karena DAU saat ini digunakan lebih dominan pada pengeluaran untuk biaya operasional belanja pegawai daripada pengeluaran untuk keperluan biaya operasional kebutuhan masing-masing daerah.

Keterbatasan

1. Periode yang diambil penelitian ini terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dalam periode bulan januari sampai bulan september yaitu 9 bulan pada tahun 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014, Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4, Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, 2016, Salemba Empat, Jakarta
- jogloabang, PP tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah, <http://www.jogloabang.com> (diakses tanggal 30 Oktober 2019)
- Karyadi. Santika Adhi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Jawa Tengah
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 53 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektora
- Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Keuangan, Klasifikasi Anggaran, www.jdih.kemenkeu.go.id (diakses tanggal 12 Desember 2019)
- Priambudi. Wimpi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa. Naskah Publikasi. Jawa tengah.
- Prof.Dr.H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, 2011, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahardja, adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, 2011, Graha, Yogyakarta.
- Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, 2014, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugoyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2011, Alfabeta, Bandung
- Suryani, Febdwi, Eka Pariani, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi, Vol 6, No 1, Hal 17-20
- Undang-Undang Pajak Lengkap, 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta.